

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Berintegritas

**#bangga
melayani
bangsa**

(0418) 21116

pemkab@takalarkab.go.id

www.takalarkab.go.id

Jln. Jend. Sudirman No. 26 Takalar



BUPATI TAKALAR KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas perkenan-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja ini disusun sebagai komitmen pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih, terbuka, akuntabel serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jabatan Bupati Takalar terdahulu telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2022 dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja telah kami laksanakan sebagai wujud pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas perjanjian kinerja dan pencapaian sasarnya serta keterkaitannya dengan penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dapat

memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) menuju ke pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada tahap berikutnya.

Sebagai Pj. Bupati Takalar saya mengucapkan Terimas Kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan Kinerja ini. Kritik, saran dan rekomendasi yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak dalam mewujudkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Takalar, Maret 2024

Pj. BUPATI TAKALAR



Dr. SETIAWAN ASWAD, M.Dev.Plg

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Daerah	3
D. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	26
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026	29
B. Perjanjian Kinerja.....	37
C. Rencana Anggaran	52
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	53
B. Analisis Capaian Kinerja.....	57
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	86
D. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	96
BAB IV PENUTUP.....	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara berkala.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dibuat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja merupakan rangkuman penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu satu tahun berupa bentuk pertanggung jawaban atas keseluruhan proses kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilandaskan suatu niat yang tulus untuk mewujudkan *Good Governance*, yakni suatu tatanan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. *Good Governance* sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintahan sangat ditentukan oleh tingkat akuntabilitas pelaporan pada semua tingkatan organisasi. Terdapat beberapa masalah sering muncul dalam upaya mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah delegasi wewenang yang tidak jelas, indikator kinerja yang tidak terukur atau tidak sesuai dengan rencana strategis, terlalu banyaknya tujuan organisasi yang akan dicapai dan kadangkala tidak konsisten, perundang undangan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan tujuan organisasi, serta tidak adanya pemisah yang

jelas antara kesuksesan dan kegagalan.

Proses penyusunan LKJ Kabupaten Takalar dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator, serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKJ adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing – masing capaian indikator kinerja yang telah diukur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua fungsi utama yaitu: Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2020 dan kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Takalar adalah sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar selain sebagai upaya perbaikan berkesinambungan baik instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, LKj diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Takalar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat diseluruh Kabupaten Takalar;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Takalar yang akuntabel, sehingga berperan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang lebih baik kepada

masyarakat;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Takalar.

Proses penyusunan LKj Kabupaten Takalar dilakukan melaluitahapan pengumpulan data kinerja kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan. Selanjutnya, menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara membandingkan realisasi dan target. Langkah akhir dari proses penyusunan LKj adalah melakukan analisis atas capaian kinerja kegiatan dan sasaran untuk kemudian dilakukan evaluasi atas masing-masing capaian indikator kinerja yang diukur.

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

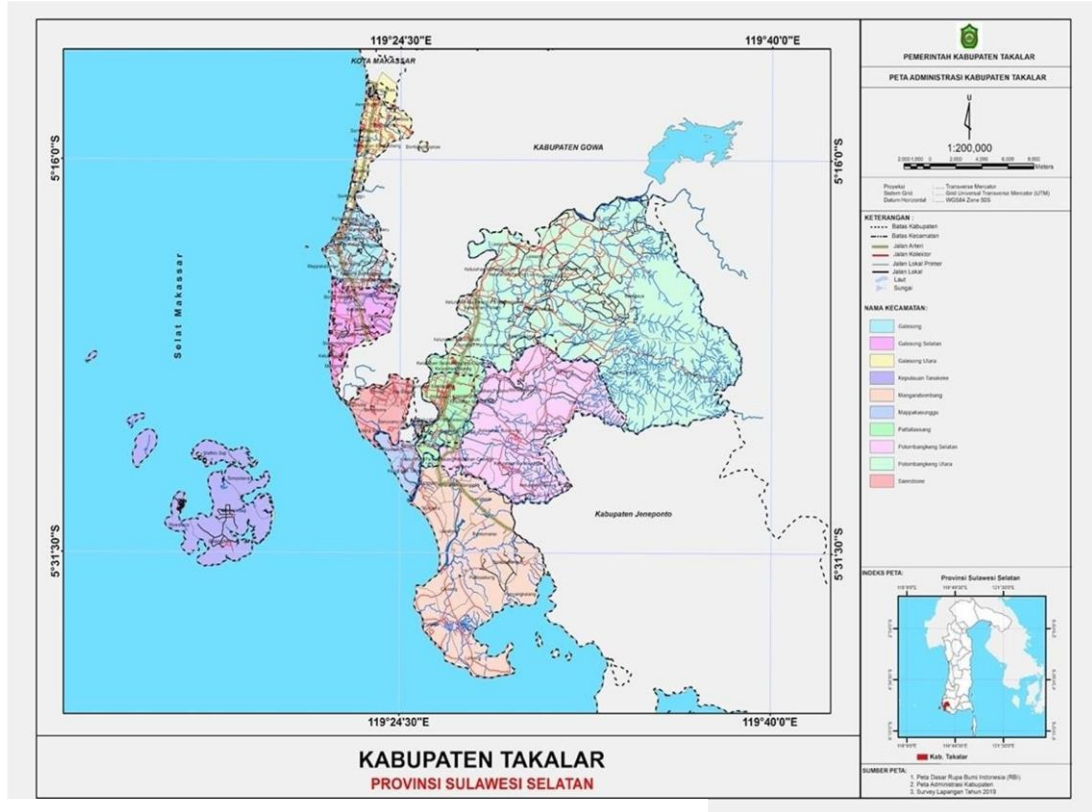
1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1. Letak Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasa dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalassang).

**Gambar I.1.
Peta Administrasi Kabupaten Takalar**





Sumber : Draft RTRW Kabupaten Takalar 2021 - 2041

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara 5030' – 5038' Lintang Selatan dan 119022' – 119039' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Sesuai Permendagri No. 56 tahun 2015 tentang luas wilayah administratif, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 56.651 ha atau 566,61 Km² atau sekitar 1,24% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.764,53 Km². Adapun jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Secara administratif, Kabupaten Takalar terdiri atas 10 (Sepuluh) wilayah kecamatan, 100 Desa/Kelurahan yang terdiri atas 86 (Delapan puluh tujuh) desa dan 24 kelurahan yang terdiri dari 465 (331 dusun dan 113 lingkungan). Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Polongbangkeng Utara (212,25



km2), dan yang paling sempit adalah Galesong Utara (15,11 km2). Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Polongbangkeng Utara (12 desa dan 6 kelurahan), sedangkan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Polombangkeng Selatan (5 desa). Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan paling banyak adalah Polongbangkeng Utara, sedangkan Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan yang paling sedikit adalah Sanrobone. Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II-1.

Tabel I.1.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kel		
1.	Mangarabombang	11	1	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	3	1	15,12	2,67
3.	Sanrobone	6	-	29,46	5,18
4.	Polongbangkeng Selatan	5	6	88,07	15,54
5.	Pattallassang	-	9	25,31	4,47
6.	Polongbangkeng Utara	12	6	212,25	37,47
7.	Galesong Selatan	13	-	24,71	4,36
8.	Galesong	17	-	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	13	1	15,11	2,67
10.	Kepulauan Tanakeke	6	-	30,15	5,32
Jumlah		86	24	566,51	100,0

Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel II-1 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu seluas 212,25 Km2 atau 37,47% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar, sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu masing-masing Kecamatan Galesong Utara yaitu seluas 15,11 Km2 (2,67%) dan Kecamatan Mappakasunggu yaitu seluas 15,12 Km2 (2,67%) dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah

pesisir dengan ketinggian 0 – 100 mdpl.

Tabel I.2.

**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan
di Kabupaten Takalar Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mangarabombang	34
2.	Mappakasunggu	44
3.	Sanrobone	22
4.	Polongbangkeng Selatan	64
5.	Pattallassang	38
6.	Polongbangkeng Utara	41
7.	Galesong Selatan	22
8.	Galesong	32
9.	Galesong Utara	17
10.	Kepulauan Tanakeke	19

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2023

1.3. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

1. Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
2. Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
3. Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
4. Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava- breksi-tufa-konglomerat dan terutama lava
5. Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur.

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulkanic (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Intrusif terdiri atas batuan

basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

1.4. Hidrologi

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung.

1.5. Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Jumlah curah hujan dan temperatur udara di Kabupaten Takalar selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel I.3.
Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara
Di Kabupaten Takalar Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan		Suhu/Temperature oC		
		Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	669,7	25	23,00	27,40	31,80
2	Februari	834,2	25	22,20	27,30	31,90
3	Maret	324,2	20	23,00	28,10	32,00
4	April	134,7	19	23,00	28,70	33,70
5	Mei	340,9	9	23,60	29,60	34,40
6	Juni	198,7	10	22,10	29,10	33,30
7	Juli	34,4	7	20,80	29,00	33,80
8	Agustus	74,3	0	20,90	29,80	34,90
9	September	154,9	0	21,20	30,90	37,10
10	Oktober	355,0	1	22,20	31,40	37,90
11	November	567,2	15	23,00	29,90	35,60
12	Desember	962,7	22	24,40	29,20	33,00

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel II-3 dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan terbanyak tahun 2022 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 962,mm7



dan terjadi selama 23 hari. Temperatur udara terendah sebesar 21,4 derajat celcius pada bulan Agustus dan tertinggi 34,6 derajat celcius pada bulan April.

1.6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km2. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Takalar terdiri atas Tubuh Air (embung), Lahan Terbuka, Tambak, Semak Belukar, Rawa, Pertanian Lahan Basah, permukiman, Perkebunan, hutan dan beberapa jenis penggunaan lahan yang lainnya. Berdasarkan tabel berikut, bahwa penggunaan lahan terluas yaitu Pertanian Lahan Basah dengan luas 32.442,53 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu perkebunan seluas 15,45 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

**Tabel I.4.
Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar Tahun 2021**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tubuh Air (Embung)	33,24	0,06
2	Lahan Terbuka	6.208,38	10,96
3	Tambak	2.916,78	5,15
4	Semak Belukar	11.880,70	20,97
5	Rawa	467,79	0,83
6	Pertanian Lahan Basah	32.442,53	57,27
7	Permukiman	903,19	1,59
8	Perkebunan	15,45	0,03
9	Hutan	1.506,26	2,66
10	Lainnya	276,67	0,49
Jumlah		56.651,00	100

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan draft peraturan daerah Kabupaten Takalar tentang RTRW Kabupaten Takalar tahun 2020-2041, pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka

mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budi daya di Kabupaten Takalar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tabel I.5.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
2	Kawasan Pertanian	Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 26.266 (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 18.457 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023
KABUPATEN TAKALAR**



		Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara
3	Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Mangarabombang.
5	Kawasan Pariwisata	Kawasan pariwisata berada di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.



6	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) terdapat di seluruh wilayah kecamatan
7	Kawasan Transportasi	Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Galesong
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Sumber : Draft RTRW KabupatenTakalar Tahun 2021-2041

1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Takalar terletak di kaki Pulau Sulawesi dimana 40% wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 74 km. Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki po tensi rawan bencana khususnya banjir dan angin puting beliung. Semua kondisi tersebut akan menimbulkan risiko dan dampak kerawanan bencana baik banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung (cuaca ektrim), gelombang ektrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu

melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Tabel I.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
2019				
1	Banjir	7 kecamatan	800 Ha	januari
2	Puting Beliung	Polongbangkeng utara dan manggarabombang	41 Rumah	Januari,maret dan november
2020				
1	Puting Beliung	Galesong utara	15 Rumah	Januari, Februari, November dan Desember
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	Sampulungan Galesong Utara	1 Rumah	Desember
2021				
1	Banjir			,
2	Puting Beliung	Galesong	9 rumah	januari
3	Gelombang pasang/abrasi	*	*	*
4	kekeringan	*	*	*
2022				
1.	Angin putting beliung	Kepulauan tanakeke	38 rumah	juni
2023				
1.	Puting beliung	Desa popo,kec galesong selatan	3 rumah	Februa ri
2.	Banjir	Pammukkulu kec.polongbangke ng utara	3 orang meninggal	Maret
3.	kekeringan	Lengkese,kec.man garabombang	50 kk terdampak	oktober

Sumber : website data informasi bencana dari BNPB Kab.Takalar

Data dan Informasi dari BNPD mencatat bahwa Kabupaten Takalar pernah mengalami kejadian bencana seperti banjir, angin puting beliung. Bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan



jumlah pengungsi yang terbanyak ada pada bencana banjir. Data dari BNPB menunjukkan kejadian yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Takalar dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Takalar masih menyimpan potensi bencana yang lain. Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana abrasi pantai sampulungan kecamatan Galesong Utara. Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pasca bencana. Menyikapi tingginya potensi risiko bencana, Kabupaten Takalar membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan Kabupaten Takalar secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana, meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Takalar, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraan PB.

Analisis bahaya bencana disusun berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Takalar dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat/kelas bahaya bencana di setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial. Kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaitu

Scoring. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut.

Kajian bahaya di Kabupaten Takalar terdiri dari 4 jenis bencana yaitu banjir, angin puting beliung, gelombang ekstrim dan abrasi, dan kekeringan. Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana berpedoman pada metodologi bahaya untuk memperoleh kelas bahaya dan peta bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kelas bahaya yaitu:

- Rendah (0 - 0,333);
- Sedang (0,333 - 0,666); dan
- Tinggi (0,666 - 1).

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Metode kajian bahaya banjir yang digunakan adalah metode GFI (Geomorphic Flood Index) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Adapun luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.7.

Bahaya Bencana Banjir Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	3.410.38	4.607.78	1.272.64	9.290.80
2.	Mappakasunggu	24.73	652.18	251.40	928.31
3.	Sanrobone	227.64	1.204.51	222.89	1.655.03
4.	Polongbangkeng Selatan	2546.74	4.409.52	637.48	7.593.74
5.	Pattallassang	375.16	2.027.91	282.71	2.685.77

6.	Polongbangkeng Utara	6.446.43	5.539.37	642.44	1.2628.24
7.	Galesong Selatan	430.46	1.532.29	227.37	2.190,12
8.	Galesong	299,26	1.627.45	231.25	2.157,96
9.	Galesong Utara	619.43	1.070.27	105.32	1.795.02
10	Kepulauan Tanakeke	1.114.34	2.192.23	490.98	3.797.56
Total		15.494.58	24.863.51	43.64.47	44.722.55
Persentase (%)		34.65	55.60	9.76	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebesar 44.722,55 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 24.863,51 Ha atau 55,60 persen. Sedangkan bahaya bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi sebesar 4.364,47Ha atau 9,76%.

Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya sehingga perlunya Pemerintah Kabupaten Takalar menyiapkan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery). Tiga Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan. Pemetaan terhadap bencana banjir juga sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana.

1.2.1. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba- tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Adapun luasan bahaya bencana banjir bandang diKabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.8.

Bahaya Bencana Banjir Bandang Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Pattallassang	14.36	61.91	120.21	196.48
2.	Polongbangkeng Selatan	54.92	280.99	756.07	1091.98



3.	Polongbangkeng Utara	194.85	575.10	906.98	1676.93
Total		264.13	918.00	1.783.26	2.965.39
Persentase (%)		8.91	30.96	60.14	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.2.2. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, cuaca ekstrim atau angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: Kep. 009 Tahun 2010 disebutkan, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer dapat terjadi ketika faktor- faktor pembentuknya terpenuhi seperti adanya wilayah tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh daerah bertekanan udara tinggi sehingga terbentuk siklon. Adapun luasan bahaya bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.9.

Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.302.16	9.302.16
2.	Mappakasunggu	918.02	918.02
3.	Sanrobone	1.643.14	1.643.14
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	21.973.31	21.973.31
7.	Galesong Selatan	2.220.02	2.220.02
8.	Galesong	2.187.85	2.187.85
9.	Galesong Utara	1.834.52	1.834.52
10	Kepulauan Tanakeke	4.120.07	4.120.07
	Total (Ha)	55.549.21	55.549.21

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020



1.2.3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Adapun luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.10.

Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya		Total (Ha)
		Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	528.70	183.06	711.76
2.	Mappakasunggu	79.66		79.66
3.	Sanrobone	99.15		99.15
4.	Galesong Selatan	146.05		146.05
5.	Galesong	107.35		107.35
6.	Galesong Utara	286.40		286.40
7.	Kepulauan Tanakeke	258.51	143.33	401.84
Total (Ha)		1.505.82	326.39	1.832.21
Presentase (%)		82.18	17.81	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebesar 1.832,21 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 1.505,82 Ha atau 82,18 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 326,39 Ha atau 17,81 persen.

1.2.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhuan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Adapun luasan bahaya bencana gempa

bumi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel I.1.
Bahaya Bencana Gempa Bumi Per kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.373.93	9.373.93
2.	Mappakasunggu	928.81	928.81
3.	Sanrobone	1.652.49	1.652.49
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.189.34	2.189.34
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.226.34	4.226.34
Total (Ha)		55.755.05	55.755.05

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Takalar sebesar 55.755,05 Ha dengan kelas bahaya sedang.

1.2.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Adapun luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.12.
**Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan Di
Kabupaten Takalar**

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Tinggi	Total (Ha)
1.	Polongbangkeng Selatan	81.34	81.34
2.	Polongbangkeng Utara	4.260.97	4.260.97
Total (Ha)		4.342.31	4.342.31

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebesar 4.342,31 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

1.2.6. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatann ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal dalam terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun luasan bahaya bencana kekeringan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.13.

Bahaya Bencana Kekeringan Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.425.26	9.425.26
2.	Mappakasunggu	938.24	938.24
3.	Sanrobone	1.666.08	1.666.08
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.220.31	2.220.31
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10.	Kepulauan Tanakeke	4.225.44	4.225.44
Total (Ha)		55.825.39	55.825.39

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

1.2.7. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilantanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Peta zona gerakan tanah dari

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah rawan longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Adapun luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.14.

Bahaya Bencana Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Polongbangkeng Selatan	6.97	186.13	3.34	196.44
2.	Polongbangkeng Utara	76.66	4.263.16	1.962.84	6.302.66
Total (Ha)		83.62	4.449.29	1.966.18	6.499.10
Presentase (%)		1.29	68.46	30.25	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebesar 6.449,10 Ha dandidominasi kelas bahaya sedang dengan luas 4.449.29 Ha atau 68 , 46 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 1.966,18 Ha atau 30 , 25 persen.

1.2.8. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Adapun luasan bahaya bencana tsunami di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel I.15.

Bahaya Bencana Tsunami Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	621.56	455.61	2.320.52	3.397.69
2.	Mappakasunggu	38.63	36.38	799.03	874.04
3.	Sanrobone	208.26	130.35	929.65	1.268.26
4.	Polongbangkeng Selatan	3.86			3.86
5.	Pattallassang	74.76	13.32	18.79	106.87

6.	Polongbangkeng Utara				
7.	Galesong Selatan	219.80	111.99	260.38	592.17
8.	Galesong	65.68	35.15	126.32	227.15
9.	Galesong Utara	222.44	143.43	298.05	663.92
10	Kepulauan Tanakeke	1.348.87	423.95	767.82	2.540.64
Total (Ha)		2.803.86	1.350.18	5.520.57	9.674.61
Presentase (%)		28.98	13.96	57.06	100

Sumber :Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Takalar yang berpotensi terdampak bahaya bencana tsunami dengan luasan sebesar 9.674,61 Ha dandidominasi kelas bahaya tinggi dengan luas 5.520,57 Ha atau 57,06 persen.

1.2.9. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalarterlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2017- 2021 sebesar 1.05%. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Sanrobone dan Galesong Utara dengan nilai laju pertumbuhan penduduk masing masing sebesar 1,34% per tahun dan terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dan Mappakasunggu yaitu masing masing sebesar 0.78. Sebagai catatan bahwa Kepulauan Tanakeke adalah Kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2019.

Tabel I.16.

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2020-2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun 2020- 2023 (%)
1	Mangarabombang	44.904	8,92
2	Mappakasunggu	10.477	7,20
3	Sanrobone	17.094	9,27
4	Kepulauan Tanakeke	7.810	11,94
5	Polombangkeng Selatan	31.061	6,59
6	Pattallassang	41.628	5,61
7	Polombangkeng Utara	53.893	8,03
8	Galesong Selatan	29.533	9,28
9	Galesong	45.035	9,66
10	Galesong Utara	44.069	9,44
KAB. TAKALAR		326.044	8,35

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024

Tabel I-16 menunjukkan sebaran kepadatan penduduk tidak merata dan hanya terfokus pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara, Mangarabombang, Pattallassang, Galesong dan GalesongUtara. Kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.791 jiwa/km² terdapat diwilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Galesong Utara. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Jika dilihat dari besaran jumlah penduduk maka Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan juga merupakan Kecamatan terluas yang ada dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Tabel I.17.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Takalar Tahun 2023

No	Kec79amatan	Luas Wilaya h (Km2)	% Pendu duk	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/ Km2)
1.	Mangarabombang	100,50	13,72	42.916	427
2.	Mappakasunggu	15,12	3,23	9.936	657
3.	Sanrobone	29,36	5,25	16.319	556
4.	Polongbangkeng Selatan	88,07	9,63	29.807	338
5.	Pattallassang	25,31	13,03	40.160	1.587
6.	Polongbangkeng Utara	212,25	16,56	51.372	242
7.	Galesong Selatan	24,71	9,00	28.210	1.142
8.	Galesong	25,93	13,70	42.873	1.653
9.	Galesong Utara	15,11	13,55	42.174	2.791
10.	Kepulauan Tanakeke	30,15	2,33	7.395	245
Takalar		566,51	100,00	311.162	549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2023), data diolah

Populasi penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 5 – 9 Tahun yaitu sebanyak 30.013 jiwa atau 9,21% dari total penduduk Kabupaten Takalar sementara populasi penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 5.493 jiwa atau 1,68% dari total jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2023.

Tabel I.18.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Takalar Tahun 2023

No	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI- LAKI	(%)	PEREMPUAN	(%)	jiwa	(%)
1	00-04	13.694	4	12.883	4	26.577	8
2	05-09	15.588	5	14.425	4	30.013	9
3	10-14	15.093	5	14.254	4	29.347	9
4	15-19	11.677	4	11.667	4	23.344	7
5	20-24	13.972	4	14.079	4	28.051	9
6	25-29	12.397	4	12.406	4	24.803	8
7	30-34	11.915	4	12.084	4	23.999	7
8	35-39	11.355	3	11.775	4	23.130	7
9	40-44	10.789	3	12.041	4	22.830	7
10	45-49	10.188	3	11.383	3	21.571	7
11	50-54	9.710	3	10.760	3	20.416	6
12	55-59	7.556	2	9.062	3	16.618	5

13	60-64	5.950	2	6.957	2	12.907	4
14	65-69	3.975	1	4.638	1	8.613	3
15	70-74	2.418	1	3.075	1	5.497	2
16	>=75	3.062	1	5.270	2	8.332	3
Takalar		159.339	49	166.750	51	326.044	100

Sumber : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten takalar

Tabel II.18 Menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Takalar jumlah penduduk laki laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan besaran rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 1,62. Berdasarkan kelompok umur dapat dilihat bahwa pada kelompok umur tertentu, jumlah penduduk perempuan lebih banyak di banding penduduk laki-laki rasio jenis kelamin diatas 4,2 terdapat pada kelompok umur 0 – 4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun dan kelompok umur 20 – 24 tahun.

1.2.10. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan social. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,diantaranya adalah :
: Angka kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar pada periode 2019-2023 mengalami penurunan tiap tahunnya, Tahun 2019 sebesar 8,7% (25.930 jiwa), turun menjadi 8,44% (25.380 jiwa) pada Tahun 2020. Selanjutnya tahun 2021 juga menurun menjadi 8,25% (24.600 jiwa) dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 8.25% (24.750 Jiwa). Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,29% (25.010 Jiwa). Angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menurun dalam kurun waktu 2019-2021 namun pada Tahun 2023, Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten Takalar meningkat. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat mendukung penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan

peningkatan angka kemiskinan. Diantaranya Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dan berbagai program social lainnya, dan Alokasi anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 dalam bentuk Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi masyarakat.

Tabel I.19.

**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan
Kabupaten Takalar Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ capital/ bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2019	356.973	25,93	8,7
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,6	8,25
2022	399.062	24,75	8,25
2023	428.941	25,01	8,29

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024

Pertumbuhan Ekonomi Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel II-20 nampak bahwa PDRB atas dasar harga berlaku berkembang rata rata jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dikarenakan PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan.

Tabel I.20.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2019-2023

No	Tahun	PDRB adh berlaku (milyar Rp.)	PDRB adh konstan (milyar Rp.)	Perkembangan (persen)
1	2019	10.157,35	6.616,25	6,87
2	2020	10.220,31	6.575,76	-0,61
3	2021	11.126,11	6.908,05	5,05
4	2022	12.257,05	7.228,40	4,64
5	2023	12.868,38	7.507,06	3,86

Rata-rata	11.325,84	6.967,10	3,96
-----------	-----------	----------	------

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024

Bila diperhatikan selama periode 2019-2023, perekonomian Kabupaten Takalar relatif stabil sampai Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 6.87 persen per tahun, namun pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative yakni sebesar -0,61 persen sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2021 menjadi 5,05 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 menurun menjadi 3,86 persen. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar atas dasar harga berlaku tahun 2023 sekitar Rp. 12.868,38 miliar dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar 50,75 persen. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar atas dasar harga konstan (2010) tahun 2023 sekitar Rp 7.507,06 miliar.

D. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 dan ditetapkan pada tanggal 10 Februari 1960. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai ibu kota Kabupaten Takalar. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nonor 7 Tahun 1990 menetapkan tanggal 10 Februari 1960 sebagai Hari jadi Kabupaten Takalat yang kemudian setiap tahun diperingati.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan aturan baru tersebut penataan organisasi melalui proses pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan melalui proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kementerian urusan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur, dari hasil proses verifikasi dan validasi data akan menentukan tipe dari organisasi. Namun masih ada perangkat daerah yang tidak memiliki tipe dan

mengenai pemberian tipe menunggu regulasi dan petunjuk teknisselanjutnya dari pusat.

Pada tahun 2022 ini berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar kembali mengalami perubahan dengan penggabungan dan pembentukan perangkat daerah baru yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perubahan jumlah, nama dan tipe Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel I.21.
Jumlah dan Nomenklatur OPD Pemerintah Kabupaten Takalar

NO	Nama OPD	Tipe
1.	Sekretariat Daerah	B
2.	Sekretariat DPRD	C
3.	Inspektorat	B
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A
5.	Dinas Kesehatan	A
6.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	A
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A
12.	Dinas Perhubungan	B
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
17.	Dinas Perikanan	B
18.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A
19.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	A
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A
22.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
26.	Badan Pendapatan Daerah	A

27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
28.	Kecamatan Pattallassang	A
29.	Kecamatan Polongbangkeng Utara	A
30.	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	A
31.	Kecamatan Mangarabombang	A
32.	Kecamatan Mappakasunggu	A
33.	Kecamatan Sanrobone	A
34.	Kecamatan Galesong Selatan	A
35.	Kecamatan Galesong Utara	A
36.	Kecamatan Galesong	A
37.	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (2023)

Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat/Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan, 24 Kelurahan, 76 desa dan 1 desa persiapan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 berjumlah 4.461 orang.

Tabel I.22.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023

Golongan	Jumlah
Golongan I	10
Golongan II	400
Golongan III	2.398
Golongan IV	1.653
Jumlah	4.461

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (2023)

Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4.461 orang di pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda yaitu: Sarjana, Magister, dan Doktor sebanyak 79,78 Diploma III berjumlah 5,85%, Diploma II berjumlah 2,33%, SLTA berjumlah 11,41%, dan sisanya merupakan pegawai berpendidikan SLTP kebawah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang akan substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabatan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunandaerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun sebagai agenda pembangunan yang menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan arahan Inmendagri No. 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah yang akan dilaporkan pencapaiannya setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Daerah

Visi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah:

Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan Sejahtera

Lahir-Bathin

Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain. Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

Misi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir-bathin
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup daerah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksternal dan internal daerah, maka isu-isu aktual yang dihadapi saat ini adalah:

1. Pemulihan dari dampak pandemik Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan terutama aspek kesehatan dan perekonomian.
2. Ketidakpastian arah perkembangan perekonomian akibat gejolak antar negara pada level global yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia.
3. Dinamika politik nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024

2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan target Pemerintah Kabupaten Takalar

Mengacu kepada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan serta isu aktual, maka rumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL II.1

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR 2026
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN-1: MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)	2,445	2,45	2,453	2,5	2,51	2,51
	SASARAN-1.1.: MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	67,72	68,83	69,7	70,31	70,54	70,54
	SASARAN-1.2: MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	29.170	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
2	TUJUAN-2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN RAMAH LINGKUNGAN	PDRB/KAPITA	33,97 JUTA	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15
		INDEKS GINI	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	SASARAN-2.1: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,05	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,16	4	3,96	3,91	3,86	3,86
	SASARAN-2.2: BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN	ANGKA KEMISKINAN (%)	8,25	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%
	SASARAN-2.3.: TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)	58,98	59,02	59,06	59,1	59,14	59,14



3	TUJUAN 3: MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	C (49,49)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)
	SASARAN 3.1.: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	NILAI SAKIP DAERAH	CC (59,38)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
		INDEKS KEPATUHAN TERHADAP SPM	46,11	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100
	SASARAN 3.2.: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	SASARAN 3.3.: TERPELIHARANYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	ANGKA KRIMINALITAS	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41



3) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah (impact based). Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut :

TABEL II.2

PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	REALISASI TARGET TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR 2026
			2021-2022		2023	2024	2025	2026	
1	INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)	ANGKA	2,445	2,447	2,45	2,453	2,5	2,51	2,51
2	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	ANGKA	67,72	67,74	68,83	69,7	70,31	70,54	70,54
3	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	ANGKA	29.170	29.172	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
4	PDRB/KAPITA	JUTA RUPIAH	33,97 JUTA	33,99 Juta	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15
5	RASIO GINI	ANGKA	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	5,05	4.10-5.55	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78
7	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)	PERSEN	4,16	4,16	4,00	3,96	3,91	3,86	3,86
8	PERSENTASE PENDUDUK DIBAWAH GARIS KEMISKINAN (ANGKA KEMISKINAN)	PERSEN	8,25%	7,35%	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%



9	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)	POINT	58,98	59,00	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14
10	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH	ANGKA	C (49,49)	B (70,00)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)
11	NILAI SAKIP DAERAH	PREDIKAT	CC (59,38)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
12	INDEKS KEPATUHAN TERHADAP SPM	INDEKS	46,11	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	90-100
13	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
14	ANGKA KRIMINALITAS	KASUS PER 100.000 PENDUDUK	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	94,41	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41



B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis kemudian dijabarkan pada kegiatan tahunan dalam bentuk perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini antaralain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Takalar Tahun 2023 dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 terdiri atas 8 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja serta didukung dengan 258 Program pendanaan dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023 yang mengalami perubahan target capaian

dengan alasan terjadi kesalahan pengetikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dengan Target 59,52 berubah menjadi target 59,02 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Awal)
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83
2	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	29,174
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah	1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03
		2	Rasio Gini	Angka	0,35
		3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62-5,98
4	Berkurangnya Penduduk Miskin	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00
		2	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	7,09%
5	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,52
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)
		2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik
8	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Perubahan)
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83
2	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	29,174
3	Meningkatnya Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah	1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03
		2	Rasio Gini	Angka	0,35
		3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62-5,98
4	Berkurangnya Penduduk Miskin	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00
		2	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen	7,09%
5	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,52
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)
		2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik
8	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91

**PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	272.244.411.750,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.731.062.181,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.527.088.377,00
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	86.673.818.142,00
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	372.682.000,00
10	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.999.000,00
11	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	772.117.300,00
12	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.520.684.000,00
13	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.956.958.400,00
14	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.743.586.350,00
15	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.326.292.000,00
16	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.982.577.750,00
17	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.163.154.000,00

18	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.221.223.000,00
19	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.126.304.750,00
20	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.924.011.000,00
21	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.920.725.000,00
22	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.205.022.750,00
23	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.204.105.750,00
24	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.312.345.750,00
25	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.053.607.750,00
26	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.317.052.750,00
27	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.625.177.000,00
28	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.562.344.000,00
29	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.880.950.894,00
30	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.600.000.000,00
31	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.280.692.086,00
32	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.614.588.000,00
33	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	809.200.000,00

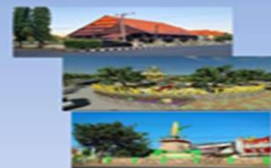
34	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
35	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.900.000,00
36	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.108.684.256,00
37	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.000.000,00
38	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	94.300.000,00
39	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.505.922.859,00
40	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	52.656.487.339,00
41	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	259.199.800,00
42	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	16.000.000,00
43	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150.000.000,00
44	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	110.500.000,00
45	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
46	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.729.696.080,00
47	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
48	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.464.274.630,00
49	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.217.131.400,00
50	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	194.016.920,00
51	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.713.515.563,00
52	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
53	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.988.137.800,00
54	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-
55	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	106.092.000,00



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



56	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.993.000,00
57	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	153.908.000,00
58	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	10.007.000,00
59	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	201.653.400,00
60	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
61	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
62	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
63	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
64	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	-
65	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-
66	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	110.000.000,00
67	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	510.000.000,00
68	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	5.000.000,00
69	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.500.000,00
70	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
71	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
72	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.064.419.677,00
73	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5.000.000,00
74	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
75	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
76	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
77	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7.500.000,00
78	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
79	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.421.700,00



80	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	14.972.000,00
81	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	4.580.000,00
82	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	159.999.800,00
83	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.422.100,00
84	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.130.489.300,00
85	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.000.000,00
86	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.956.563.000,00
87	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.821.600.000,00
88	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	385.019.900,00
89	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	77.350.000,00
90	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	77.350.000,00
91	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	20.884.000,00
92	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.482.516.000,00
93	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
94	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.890.206.627,00
95	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	176.869.600,00
96	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	77.847.800,00
97	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	838.148.891,00
98	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
99	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

100	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.670.017.650,00
101	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.609.086.600,00
102	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	150.049.200,00
103	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	29.589.200,00
104	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	150.338.200,00
105	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	108.180.000,00
106	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.562.259.672,00
107	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.778.038.220,00
108	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.901.200,00
109	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.595.045.739,00
110	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.622.383.392,00
111	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	765.356.604,00
112	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000,00
113	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	150.000.000,00
114	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.350.712,00
115	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-
116	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-
117	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-
118	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-
119	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.031.200,00
120	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.067.000,00
121	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	35.211.000,00
122	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	427.800.000,00
123	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	587.200,00

124	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	350.000.000,00
125	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	149.999.900,00
126	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
127	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.395.786.348,00
128	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	299.999.360,00
129	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
130	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
131	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
132	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
133	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
134	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
135	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-
136	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-
137	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-
138	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-
139	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-
140	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-
141	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-
142	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
143	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-
144	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5.000.000,00
145	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.948.075.754,00

146	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14.013.384.400,00
147	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.427.468.003,00
148	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.029.000,00
149	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
150	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120.000.000,00
151	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-
152	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-
153	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-
154	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.767.556.763,00
155	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	449.999.500,00
156	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	99.999.800,00
157	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
158	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
159	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.134.626.293,00
160	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.850.108.050,00
161	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.933.149.900,00
162	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	989.435.700,00
163	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.127.300.206,00
164	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.350.203.900,00
165	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.093.952.494,00
166	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.575.000,00
167	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	260.902.100,00

168	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.973.059.480,00
169	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	50.000.000,00
170	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	40.000.000,00
171	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000,00
172	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
173	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.000.000,00
174	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.000.000,00
175	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
176	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.802.858.972,00
177	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.158.500.100,00
178	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.198.750.000,00
179	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-
180	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-
181	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.342.661.439,00
182	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5.583.175.800,00
183	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.268.086.306,00
184	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	749.978.700,00
185	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	409.999.800,00
186	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	519.998.400,00
187	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.925.183.615,00
188	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	138.810.949.651,00

189	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.500.002.044,00
190	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-
191	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.754.406.860,00
192	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.667.230.900,00
193	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.623.434.800,00
194	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	60.000.000,00
195	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	614.400.000,00
196	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.491.692.991,00
197	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	401.228.600,00
198	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	117.820.000,00
199	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.023.403.600,00
200	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.500.000,00
201	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.810.800.000,00
202	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
203	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.022.307.076,00
204	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.160.000,00
205	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.715.000,00
206	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.160.000,00
207	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.140.000,00
208	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.151.576.448,00
209	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	591.508.200,00
210	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	265.632.000,00
211	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

212	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
213	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
214	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.902.732.486,00
215	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.129.400,00
216	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.648.000,00
217	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.326.400,00
218	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.301.400,00
219	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.973.600,00
220	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.778.146.100,00
221	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.000,00
222	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	227.600.000,00
223	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-
224	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
225	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
226	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.612.148.000,00
227	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.029.200,00
228	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-
229	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
230	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.201.127.200,00
231	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.435.000,00
232	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.536.000,00
233	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.518.000,00

234	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.676.000,00
235	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.403.320.700,00
236	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000,00
237	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	214.000.000,00
238	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.000.000,00
239	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
240	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.000.000,00
241	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.704.456.000,00
242	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
243	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.000.000,00
244	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
245	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
246	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
247	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.216.793.000,00
248	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.319.200,00
249	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.272.000,00
250	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.622.400,00
251	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-
252	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.091.400,00
253	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.692.762.618,00
254	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	224.878.200,00
255	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	954.233.000,00

	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
256	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.283.400,00
257	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.977.800,00
258	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	619.940.600,00

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Takalar, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.093.191.708.318 dan setelah perubahan sebesar Rp.1.135.719.520.125, yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN	
		DPA	DPPA
1	BELANJA OPERASI	909.354.089.832	926.874.215.138
2	BELANJA MODAL	183.837.618.486	208.845.304.987
Jumlah		1.093.191.708.318	1.135.719.520.125

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diharapkan (target) dengan kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dan dilakukan secara berkala baik itu (triwulan) maupun tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel III.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Inteval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Nilai Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Hingga akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan target kinerja seperti yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja yang memuat realisasi capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut:



TABEL III.2.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA						
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Kode
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450	3,21	131%	ST
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83	71,46	104%	ST
SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR						
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Kode
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,174	33,89	114%	ST
SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SECTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH						
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Kode
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03	41,14	121%	ST
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,375	92,86%	ST
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62-5,98	3,86	72,83%	SEDANG
SASARAN STRATEGIS 4 BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN						
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Kode
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00	2,36	110,5%	ST
2	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	Persen	7,09%	8,29%	83,07%	TINGGI
SASARAN STRATEGIS 5 TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,52	66,23	111%	ST
SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)	52,33	73%	SEDANG
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	63,37	97%	ST



SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70	93,78	144%	ST
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100%	ST
SASARAN STRATEGIS 8 TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91	22,3	175,7%	ST

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian pengukur Indikator Kinerja Utama di Tahun 2023 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

TABEL III.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,21	Bappelitbangda Kab. Takalar
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,46	Bappelitbangda Kab. Takalar
SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	33,88%	Dinas PUTRKP Kab. Takalar





LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1.	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	41,14	Bappelitbangda Kab. Takalar
2	Rasio Gini	Angka	0,375	Bappelitbangda Kab. Takalar
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,86	Bappelitbangda Kab. Takalar
SASARAN STRATEGIS 4 BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,58	Bappelitbangda Kab. Takalar
2	Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	Persen	8,29%	Kabupaten Takalar Dalam Angka 2024
SASARAN STRATEGIS 5 TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	66,23	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Takalar
SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (52,33)	Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar (LHE Evaluasi KemenPan RB)
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (63,37)	Bagian Organisasi Setda Kab. Takalar(LHE Evaluasi KemenPan RB)



SASARAN STRATEGIS 7 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	93,78	Tata Pemerintahan Setda Kab. Takalar
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Bappelitbangda Kab. Takalar
SASARAN 8 TERPELIHARANYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Sumber Data
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	22,3	Satpol PP dan Damkar Kab. Takalar

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk melihat perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya serta sebagai proyeksi untuk target pencapaian kinerja di tahun akhir RPJMD. Analisis ini juga berfungsi untuk mencari tahu apa penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tahun 2022 untuk masing – masing sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.4.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450	3,21	131%
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83	71,46	104%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					118%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023, Capaian kinerja pada sasaran 1 telah



mencapai nilai rata-rata capaian sebesar 118% dengan kriteria sangat tinggi (ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,84	3,21
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,31	71,46

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran I mencapai 37,33 % dimana kedua Indikator mengalami peningkatan.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka menengah RPD

Tabel. III.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450	3,21	131%
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83	71,46	104%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					118%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 1 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 118% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).



d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Aspek tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) terdapat 12 Pilar/Variabel meliputi pilar Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Kesiapan Teknologi, Dinamika Pasar, dan Kapasitas Inovasi yang menjadi komponen daya saing daerah (BRIN, 2021-2023). Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa Kabupaten Takalar pada tahun 2021 memperoleh nilai 2,455 atau predikat berdaya saing SEDANG. Hasil tersebut meningkat dari hasil sebelumnya pada tahun 2020 dengan nilai 1.2000 atau predikat RENDAH. Sedangkan pada tahun 2022, kembali mengalami peningkatan Indeks dengan capaian 2,84 dengan predikat SEDANG. Pada tahun 2023 nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3.21 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Kabupaten/Kota	Nilai Indeks			
	2020	2021	2022	2023
Nasional	-	-	3.26	3.44
Sulsel	-	3.138	3.35	3.70
Takalar	1.2000	2.455	2.84	3.21

Berdasarkan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023, terdapat



4 aspek dan 12 pilar yang menjadi fokus daya saing daerah Kabupaten Takalar sebagaimana pada tabel berikut:

No	Aspek/Pilar	2023
I	Aspek Lingkungan Pendukung	4.940
1	Institusi	4.080
2	Infrastruktur	3.190
3	Adopsi TIK	4.350
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3.200
II	Aspek Sumber Daya Manusia	4.200
5	Kesehatan	3.660
6	Keterampilan	3.350
7	Pasar Produk	2.350
8	Pasar Tenaga Kerja	3.240
III	Aspek Pasar	2.770
9	Sistem Keuangan	1.580
10	Ukuran Pasar	3.960
IV	Aspek Ekosistem Inovasi	1.385
11	Dinamisme Bisnis	3.780
12	Kapabilitas Inovasi	1.760
NILAI IDSD		3.208

Dari tabel tersebut dapat tergambar bahwa masih terdapat 2 (dua) aspek yang membutuhkan perhatian dan perbaikan yaitu aspek pasar dan aspek Ekosistem Inovasi. Untuk itu, dalam rangka membangun daya saing daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan pemetaan potensi daerah mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
- b. Mendorong upaya-upaya peningkatan layanan publik;



- c. Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk pengembangan SDM;
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
- e. Menumbuhkembangkan iklim inovasi;
- f. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal;

Selalu meningkatkan kesiapan kapabilitas pemerintah daerah termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan daerah

Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) merupakan penilaian yang terdiri dari 4 (empat) Indikator penghitung yaitu harapan lama sekolah, Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita. Dimana pada tahun 2023, Kabupaten Takalar berhasil meningkatkan IPM dari Kategori sedang (68.31) peringkat 22 menjadi 71,46 ke peringkat 18 dari 24 Kab/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini didukung dengan adanya solusi yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Takalar antara lain:

1. untuk indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yaitu:
 - a. Adanya program Penanganan ATS di Kabupaten Takalar
 - b. Adanya program PAUD-HI (Pendidikan Anak Usia Dini –Holistik Integratif)
2. Untuk indikator Angka Harapan Hidup yaitu:
 - a. Adanya keberhasilan pada program percepatan penurunan stunting
 - b. Semakin meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan
 - c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - d. Kualitas layanan Kesehatan
 - e. Efektifitas Penanganan Kesehatan
3. Untuk indikator pengeluaran perkapita yaitu:
 - a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi



- b. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga
- c. Memperluas kesempatan kerja terutama di sector non pertanian di wilayah pedesaan.
- d. Menurunkan angka kemiskinan

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur

- a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.7.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,174	33,88	114%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1 pada tabel diatas, indikator kinerja pada sasaran 2 mencapai kriteria sangat tinggi (ST) dengan capaian kinerja sebesar 114%.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.8
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	45,57	33,88

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya pada sasaran 2 mengalami penurunan capaian sebesar 11,69 dari 45,57 menjadi 33,88.



- c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.9
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29,174	33,88	114%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 2 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 114% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan perbandingan capaian Tahun 2022 dengan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan dari data capaian 45,57 di Tahun 2022 menjadi 33,88 pada Tahun 2023 hal ini disebabkan karena adanya pemotongan anggaran akibat pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang hanya dilaksanakan pada tahap perencanaan.

Namun, untuk capaian Tahun 2023 dengan target sebesar 29,174 dan realisasi sebesar 33,88 memperoleh capaian sebesar 114% yang dianggap berhasil dengan Kriteria Capaian ST (Sangat Tinggi).

Keberhasilan Kinerja ini dapat dicapai dengan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif (Dinas PUTRPPK) dengan pihak terkait seperti pihak legislatif dan komponen masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu juga didukung dengan adanya penambahan anggaran pada program Program Penyelenggaraan Jalan.





Foto: Kegiatan Pembangunan Jalan (Dinas PUTRPPK Kabupaten Takalar)

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produktifitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.10
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03	41,14	121%
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,375	92,86%
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.62-5.98	3,86	72,83%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					95,56%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 pada tabel diatas, nilai capaian pada sasaran telah mencapai capaian 95,56% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST) dimana ada 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran 3 telah mencapai kriteria sangat tinggi (ST) dan 1 (satu) indikator baru mencapai sasaran capaian sedang (S).



b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	39,73	41,14
2	Rasio Gini	Angka	0,368	0,375
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,64	3,86

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya. Dimana ada 2 Indikator kinerja yang mengalami peningkatan dan 1 indikator kinerja mengalami penurunan.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03	41,14	121%
2	Rasio Gini	Angka	0,35	0,375	92,86%
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,62-5,98	3,86	72,83%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					95,56%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 3 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar



95,56% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,14 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha, serta tidak dipengaruhi inflasi.

Untuk indikator kinerja Angka Gini Rasio di Kabupaten Takalar Tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2020 dari 0,356 menjadi 0,375 yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Takalar pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan rendah.

Sementara Ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2023 dibanding tahun 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada juga beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi terbesar terjadi di lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu sebesar -2,78 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -2,08 persen. Adapun lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah jasa lainnya sebesar 10,37 persen dan jasa perusahaan sebesar 9,02 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan



sebesar 3,80 persen.

Adapun solusi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Takalar terkait Sasaran Meningkatnya Produktifitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-sektor Perekonomian Daerah yang berasal dari sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan antara lain:

1. Melalui sektor pertanian dan perkebunan antara lain:
 - a. Penyediaan Sarana Pertanian berupa pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen dan pasca panen serta bantuan pupuk organik.
 - b. Penyediaan Prasarana pertanian berupa penyediaan prasarana irigasi, jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan.
 - c. Dilakukan upaya peningkatan pengetahuan petani dalam bercocok tanam melalui sekolah lapang dan demplot-demplot komoditi tanaman pangan
 - d. Dilakukan pembagian benih dan bibit pekarangan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan kelompok wanita tani melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
 - e. Penyediaan alokasi anggaran



Penyediaan alsintan prapanen dan pasca panen

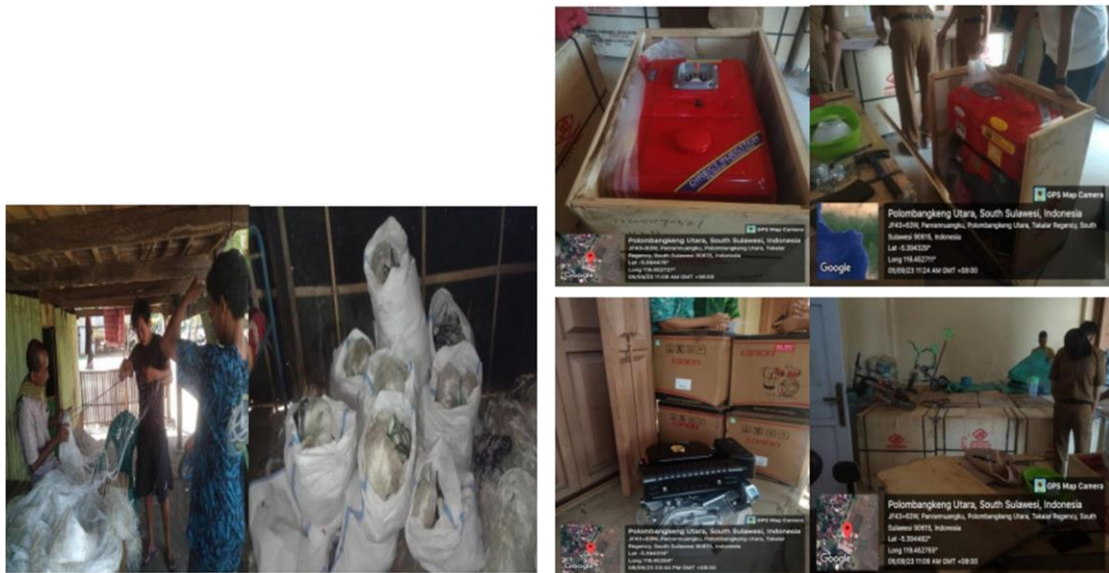


Penyediaan prasarana pertanian

Peningkatan pengetahuan petani

2. Melalui sektor perikanan antara lain:

- a. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan jaring Milenium (Dana DAK
- b. Pengadaan Perahu/Kapal Mesin dan Alat Penangkapan ikan (DAK)
- c. Pengadaan Mesin Perahu
- d. Rehab Jalan Produksi/jalan Nelayan





Dokumentasi peningkatan ekonomi pada sektor perikanan

3. Dari sektor Peternakan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih mengacu pada Rencana Strategis;
2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan;
3. Menyempurnakan implementasi anggran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat di nilai kinerjanya secara tepat;
4. Memperkuat upaya cakupan pengawasan pihak yang terkait

4. Dari Sektor Tenaga kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Indikator kinerjanya
2. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator kinerjanya



4) Sasaran Strategis 4 : Berkurangnya Penduduk Miskin

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,00%	3,58%	110,5%
2	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	7,09%	8,29%	83,07%
RATA-RATA CAPAIAN					96,79

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 4 pada tabel diatas, sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin telah mencapai capaian sebesar 96,79% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST) dimana 1 (satu) kedua indikator dengan capaian Sangat Tinggi (ST) dan 1 (satu) Indikator dengan capaian Kriteria Tinggi (T).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.14
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,63	3,58
2	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	8,25	8,29

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya. Kedua Indikator pada Sasaran 4 ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,99%.



- c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.15

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Tingkat pengangguran terbuka	Angka	4,00%	3,21	110,5%
2.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Angka	7,09%	71,46	83,07%
RATA-RATA CAPAIAN					96,79%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, sasaran 4 Berkurangnya Penduduk Miskin telah mencapai rata-rata capaian sebesar 96,79% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya dapat dilihat bahwa pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka mengalami peningkatan. Hal ini dapat digambarkan secara langsung bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar meningkat. Namun jika dilihat pada indikator penilaian, hal ini tidak boleh dianggap meningkat, karena pada jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 meningkat tajam jumlahnya dibandingkan jumlah pengangguran.

Solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penanganan tingkat pengangguran terbuka ini yaitu dengan menggunakan program-program kegiatan antara lain :



1. Program peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Takalar
2. Menumbuhkan wirausaha Baru melalui Pelatihan dan Sosialisasi Bagi Usaha Baru
3. Pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Secara kuantitas jumlah penduduk miskin Takalar turun, yaitu dari 25.360 jiwa pada tahun 2020 menjadi 24.750 jiwa pada tahun 2023. Secara persentase jumlah penduduk miskin juga turun dari 8,70 pada Tahun 2020 menjadi sebesar 8,29 persen pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin Takalar lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,70 persen dan Nasional 9,36 persen pada tahun 2023.

Setelah diadakan parpel di desa dan kelurahan maka jumlah kemiskinan menurun karena yang sudah layak menjadi tidak layak (sudah mampu). Tidak adanya lapangan kerja sehingga pengangguran bertambah dan inflasi semakin tinggi dan konsumsi masyarakat relatif semakin tinggi.

Adapun solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal penanganan Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan dengan adanya program keluarga harapan (PKH) dan dengan adanya program keluarga harapan (PKH).

5. Sasaran Strategis 5 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,52	66,23	111%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 5 pada tabel diatas, indikator kinerja pada sasaran 5 telah mencapai kriteria sangat tinggi (ST) dengan nilai capaian sebesar 111%.



b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.17
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	-	66,23

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja pada sasaran 5 belum bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, berhubung indeks capaian tahun lalu tidak dilakukan perhitungan. Hal ini disebabkan karena salah satu indikator penghitung tidak memiliki data dikarenakan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak pusat yaitu indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak dilakukan.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.18
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,52	66,23	111%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 5 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 111% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).



d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Pada sasaran ini, penilaian kinerja pada Dinas Lingkungan



Gambar 3.
Pengambilan Sampel Kualitas Udara
perkantoran

Hidup dan Pertanian Kabupaten Takalar dilakukan berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. Pada penilaian kualitas air, walaupun kualitas air berada pada level standar tetapi kegiatan ini memiliki

kendala pada pelaksanaan pengujian laboratorium lingkungan yang belum beroperasi secara optimal. Pada pelaksanaan penilaian kualitas lingkungan dilaksanakan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan yang terselenggara untuk mendukung pencapaian sasaran ini yaitu dengan identifikasi serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Seperti contohnya penilaian kualitas udara dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan penilaian indeks kualitas tutupan lahan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penganggungan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup pada usaha yang telah memiliki izin. Izin tersebut dijabarkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang dimiliki oleh usaha atau kegiatan yang telah berizin. Umumnya industry/kegiatan yang mengajukan dokumen Amdal, UKL/UPL hanya yang dilakukan oleh pelaku berskala menengah keatas, sementara industry kecil/rumah tangga umumnya tidak mengajukan perizinan lingkungan. Kemudian



perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Takalar tidak semua memiliki cerobong udara yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam standar lingkungan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar SKPD yang terkait dalam penanganan sektor lingkungan hidup dengan upaya mengurangi produksi sampah/limbah menjadi penyebab terhambatnya pencapaian target pengendalian kerusakan lingkungan.

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Tahun 2023 meliputi kegiatan Rehabilitasi Hutan Tanaman Mangrove, pemeliharaan RTH termasuk pada RTH bantuan Pemerintah Provinsi serta pengelolaan areal pertamanan. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang ditetapkan sebagai RTH tidak sebanding dengan peningkatan luas areal perkotaan.



Gambar 3.
Pengelolaan RTH Kabupaten



Gambar 3.
RTH merupakan salah satu indikator persentase penutupan

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.19
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)	CC (52,33)	73%



2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	B (63,37)	97%
RATA-RATA CAPAIAN					85%

Berdasarkan hasil pengukuran Perbandingan target dan realisasi sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada tabel diatas, perbandingan antara target dan realisasi mencapai rata-rata capaian sebesar 85% dengan kriteria Tinggi (T) , pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mendapat capaian sebesar 73% dengan kriteria Sedang (S) sementara untuk Indikator kedua dengan Nilai SAKIP Daerah meraih capaian 97% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.20
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	CC (54,92)	CC (52,33)
2	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (61,45)	B (63,37)

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya, sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada tabel diatas, pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan angka sebesar 2,59 namun masih dalam predikat yang sama yaitu CC sementara untuk Indikator kedua dengan Nilai SAKIP Daerah mengalami peningkatan angka sebesar 1,92 namun masih dalam predikat yang sama pula yaitu B.



- c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.21
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)	CC (52,33)	73%
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B (60-70)	63,37	97%
RATA-RATA CAPAIAN					85%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 6 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 85% dengan kriteria Tinggi (T).

- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya, sasaran 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada tabel diatas, pada Indikator Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan angka sebesar 2,59 namun masih dalam predikat yang sama yaitu CC sementara untuk Indikator kedua dengan Nilai SAKIP Daerah mengalami peningkatan angka sebesar 1,92 namun masih dalam predikat yang sama pula yaitu B.

Untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat mencapai



target RPD tahun 2023 – 2026 dan justru mengalami penurunan angka hal ini disebabkan karena Evidence dalam pemenuhan data pendukung belum maksimal hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 ini merupakan awal pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Takalar yang berarti dokumen pendukung yang baru pula serta adanya perubahan metode penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB (KemenPanRB) dimana pada tahun sebelumnya menggunakan Metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sedangkan di Tahun 2023 menggunakan method penginputan Road Map 2023-2026 dan rencana aksi 2023-2026 pada Aplikasi portal RB.

Sementara untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Daerah, 100% Perangkat Daerah telah menyelesaikan Laporan Kinerja dan perjanjian kinerja dengan tepat waktu. Meskipun demikian, kualitas perencanaan dan pelaporan harus lebih ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang. Terkendalanya pelaporan baik itu laporan keuangan, LKj, LPPD dan sebagainya biasanya terjadi karena terlambatnya pengumpulan data primer maupun data pendukungnya sehingga proses pemasukan data juga terlambat.

Adapun solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kemenpan RB dan LHE Internal oleh Inspektorat
2. Melakukan Asistensi/pendampingan penyusunan dokumen SAKIP/ RB
3. Melakukan Monev pelaksanaan Peningkatan SAKIP dan RB
4. Meningkatkan Koordinasi baik dengan Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Perangkat Daerah terkait
5. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbaru





Dokumentasi Pelaksanaan Asistensi Dokumen SAKIP



Dokumentasi Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan RB



Dokumentasi Pelaporan Serentak SAKIP Perangkat Daerah kabupaten Takalar



Dokumentasi Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 kabupaten Takalar

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.22
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70	93,78	144%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100%
RATA-RATA CAPAIAN					122%

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antar target dan realisasi pada sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada tabel diatas, ke-2 indikator kinerja pada sasaran 7 telah mencapai 122% capaian dengan kriteria sangat tinggi (ST).



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.23

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	91,07	93,78
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik

Pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dimana pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap Standar Pelayanan Minimal mengalami peningkatan capaian sebesar 2,71 dan pada Indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat mendapat capaian yang tetap yaitu dengan indeks Baik.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.24

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70	93,78	144%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100%
RATA-RATA CAPAIAN					122%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD. Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 7 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 122% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST).



d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kebijakan pemerintah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dimana penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan tahapan diantaranya pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dari tahapan Standar Pelayanan Minimal tersebut mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu persyaratan agar Standar Pelayanan Minimal dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan, memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kota Denpasar. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing urusan yang menangani Standar Pelayanan Minimal adalah tetap memotivasi dan memfasilitasi kegiatan kedepannya untuk dapat berjalan dengan lancar dan secara optimal. Berbagai peraturan, termasuk petunjuk pelaksanaan maupun teknis dan instrumen masih perlu dilengkapi untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Adapun program-program pendukung setiap urusan yang menangani SPM yaitu :

1. Bidang Urusan Pendidikan dengan program Pengelolaan Pendidikan
2. Bidang Urusan Kesehatan dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dengan Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



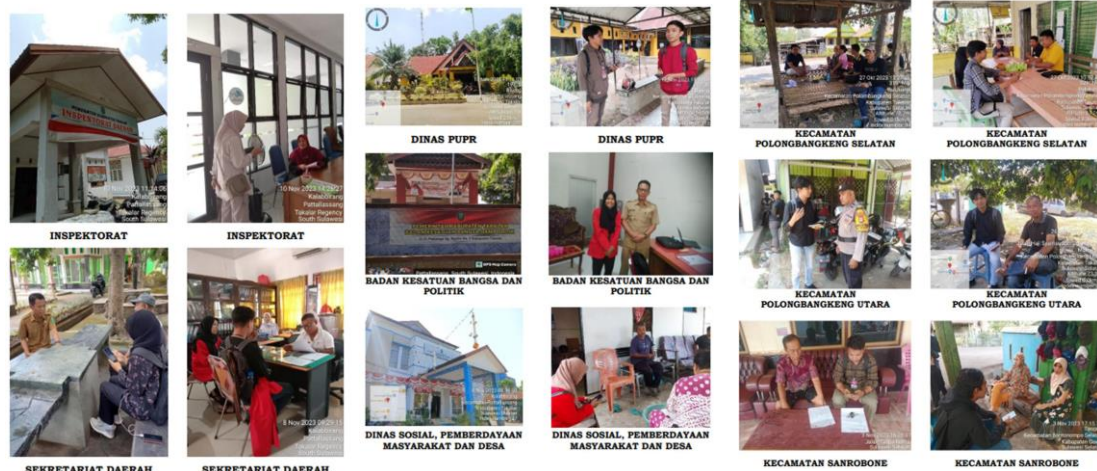
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dengan Program Pengembangan Perumahan
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dengan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. Bidang Urusan Sosial Dengan Program Rehabilitasi Sosial

Sementara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan oleh masyarakat serta untuk mengetahui dari aspek-aspek mana saja yang belum memenuhi kepuasan masyarakat dalam dilayani. Sekaitan dengan hal tersebut, maka guna mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Takalar dalam hal ini seluruh OPD/Instansi, Kecamatan, Rumah Sakit, dan seluruh Puskesmas dengan jumlah keseluruhan sebanyak 55 unit telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tingkat Kepuasan masing-masing instansi telah dijabarkan dengan Rata-rata nilai mutu dari 55 Instansi, seluruhnya menunjukkan hasil "BAIK". Oleh karena itu secara keseluruhan responden yang disebar semua di instansi, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memperoleh nilai IKM sebesar 3.268 poin dan nilai unsur sebesar 80.16 dengan predikat BAIK. Dari 55 Unit kerja yang menjadi lokasi survey, 7 Unit kerja memperoleh predikat rata-rata memperoleh nilai interval sekitar 3,5324 - 4,00 dan Nilai Interval Konversi 88,31 - 100 atau SANGAT BAIK, kemudian terdapat 37 unit kerja memperoleh predikat rata-rata nilai interval sekitar 3,0644 - 3,532 dan Nilai Interval Konversi 76,61 - 88,30 atau kategori B (BAIK), sedangkan 11 unit kerja, unsur yang relatif rendah memperoleh predikat rata-rata nilai interval sekitar 2,60 - 3,064 dan Nilai Interval Konversi 65,00 - 76,60 atau kategori C (KURANG BAIK).

Berdasarkan data tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu memberikan Perhatian Khusus kepada Unit kerja yang memiliki unsur yang relatif rendah dibanding unsur yang lain pada setiap unit kerja. Beberapa



upaya Peningkatan kualitas Sumber daya manusia terutama yang terkait langsung dengan pemberi layanan, perlu terus dilakukan secara berkala, baik diklat maupun pembinaan oleh pimpinan instansi unit kerja. Bersamaan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan juga, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu, guna mewujudkan transparansi dalam pemberian layanan, maka seluruh instansi unit kerja perlu menjelaskan dan adanya SOP yang jelas dalam setiap Instansi Unit Kerja. Untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan, maka survey Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkala, minimal sekali setahun, agar instansi Unit Layanan dapat melakukan perbaikan layanan sesuai dengan penilaian dan kebutuhan.



Dokumentasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

8. Sasaran Strategis 8: Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban

a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel III.25

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91	22,3	175,7%

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 8 pada tabel diatas, indikator kinerja pada sasaran 8 sebesar 175,7% dengan kriteria Sangat Tinggi (ST)

b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel III.26

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian	
			2022	2023
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	33	22,3

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 8 pada tabel diatas, perbandingan capaian indikator kinerja sasaran 8 pada Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya terdapat penurunan realisasi sebesar 10,7.

c) Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini target Jangka Menengah RPD

Tabel. III.27

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target RPD

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91	22,3	175,7%

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPD 2023 – 2026 sehingga target tahun 2023 merupakan kondisi awal dari target RPD.



Berdasarkan tabel diatas, untuk capaian pada Sasaran 8 dengan perbandingan kondisi kinerja target jangka menengah yaitu sebesar 175,7% dengan Kriteria Sangat Tinggi (ST).

- d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan
- Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja pada sasaran 8, Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban dalam hal ini disebabkan antara lain :

- a. Membentuk Posko 3 Pilar (Binmas, Babinsa, dan kades
- b. Melaksanakan Sambang
- c. Melaksanakan Jum'at Curhat (Binluh, menampung permasalahan masyarakat)
- d. Melaksanakan patrol Gabungan (TNI, POLRI dan SATPOL PP setiap malam minggu)
- e. Melaksanakan patrol Blueligth
- f. Melaksanakan kegiatan KKYD

Adapun solusi yang dilaksanakan dalam penanganan angka kriminalitas antara lain dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti:

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum,



- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,
- i. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} : \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 1.167.285.817.791,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 1.270.139.670.225,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 8,10% dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.102.853.852.434,-

TABEL.III.28
DAFTAR REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persen
		Jumlah	Jumlah		
	2	7	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	266.721.508.274	240.240.782.473	26.480.725.801	90
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.837.227.446	118.174.837.348	3.662.390.098	97
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	284.407.000	201.653.400	82.753.600	71
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	675.471.260	611.275.610	64.195.650	91
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.327.021.544	49.989.360.985	1.337.660.559	97
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131.042.645.886	115.200.865.074	15.841.780.812	88

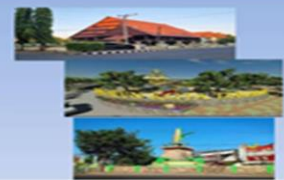




BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.023.676.100	993.850.690	29.825.410	97
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	166.517.900	122.997.900	43.520.000	74
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.619.465.200	1.365.849.400	253.615.800	84
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.671.284.497	27.472.329.544	1.198.954.953	96
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.970.302.938	64.014.484.755	2.955.818.183	96
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.441.460.018	7.142.362.703	299.097.315	96
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.704.513.100	11.942.333.889	4.762.179.211	71
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	958.606.000	832.521.000	126.085.000	87
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.900.000	11.880.000	20.000	100
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.702.682.806	3.969.575.354	1.733.107.452	70
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.996.600	4.993.500	3.100	100
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	201.310.000	100.989.000	100.321.000	50
19	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	19.302.426.675	11.372.030.340	7.930.396.335	59
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.479.740.038	59.411.989.032	2.067.751.006	97
21	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	280.373.900	280.125.497	248.403	100
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	446.865.250	445.053.050	1.812.200	100
23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	153.370.000	151.191.280	2.178.720	99
24	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	178.579.900	177.790.000	789.900	100
25	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.075.196.080	3.048.990.700	26.205.380	99
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.057.351.398	8.796.043.490	261.307.908	97
27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.822.761.200	1.813.979.180	8.782.020	100

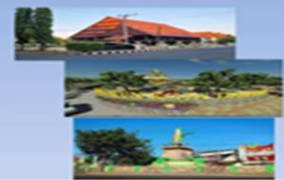




BerAKHLAK
Berkorban, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



28	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	493.566.470	490.847.398	2.719.072	99
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.203.052.566	1.961.729.929	241.322.637	89
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	148.023.300	98.026.937	49.996.363	66
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.912.357.080	3.640.714.044	271.643.036	93
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	0	0	0
33	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	394.512.000	385.802.032	8.709.968	98
34	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	242.795.000	223.383.800	19.411.200	92
35	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	263.253.000	260.679.100	2.573.900	99
36	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.147.000	7.132.000	15.000	100
37	PROGRAM PENATAAN DESA	50.000.000	42.536.380	7.463.620	85
38	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0	0	0	0
39	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	756.600.000	502.649.254	253.950.746	66
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.750.000.000	1.670.336.490	79.663.510	95
41	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	3.009.500	3.009.500	0	100
42	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51.140.500	51.140.500	0	100
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.229.368.642	5.780.944.548	448.424.094	93
44	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.510.400	3.430.400	80.000	98
45	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	106.249.500	105.779.500	470.000	100
46	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	300.000.000	0	300.000.000	0
47	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	50.000.000	50.000.000	0	100
48	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.599.800	3.584.200	15.600	100





LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195.969.900	192.405.489	3.564.411	98
50	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	139.550.000	139.508.000	42.000	100
51	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	4.580.000	4.580.000	0	100
52	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	320.421.200	317.955.000	2.466.200	99
53	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.422.100	10.372.100	50.000	100
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.849.976.260	3.565.847.731	284.128.529	93
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	391.849.500	372.223.482	19.626.018	95
56	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.279.992.400	2.948.158.100	331.834.300	90
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.438.227.000	2.294.411.000	143.816.000	94
58	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	484.779.900	484.721.400	58.500	100
59	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	77.350.000	77.333.600	16.400	100
60	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	77.350.000	77.327.400	22.600	100
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.547.286.471	10.592.565.320	954.721.151	92
62	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.287.575.600	3.544.826.156	742.749.444	83
63	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.399.607.142	10.088.184.059	311.423.083	97
64	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	10.029.000	9.969.000	60.000	99
65	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	270.000.000	269.600.000	400.000	100
66	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	16.127.000	15.617.000	510.000	97
67	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.470.009.000	2.438.789.240	31.219.760	99





BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangsa
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.519.587.609	5.281.059.200	238.528.409	96
69	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	326.869.400	321.772.800	5.096.600	98
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	127.847.520	120.922.600	6.924.920	95
71	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	838.148.891	833.342.550	4.806.341	99
72	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.116.158.950	5.043.455.647	72.703.303	99
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.537.707.758	3.327.591.218	210.116.540	94
74	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	708.368.000	706.341.462	2.026.538	100
75	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	115.005.200	69.322.554	45.682.646	60
76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	150.452.100	149.562.075	890.025	99
77	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	108.180.000	107.580.000	600.000	99
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.094.440.468	3.700.853.803	393.586.665	90
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.964.832.084	1.112.174.567	852.657.517	57
80	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.901.200	4.901.200	0	100
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.078.810.303	2.851.594.906	227.215.397	93
82	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.490.491.722	2.461.680.422	28.811.300	99
83	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.238.991.224	4.093.632.298	145.358.926	97
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	627.814.700	553.299.170	74.515.530	88
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	148.209.900	147.559.900	650.000	100
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.901.442	2.427.952.310	729.949.132	77
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.393.200	3.009.000	384.200	89





BerAKHLAK
Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



88	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	509.600	0	509.600	0
89	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	12.174.000	11.084.000	1.090.000	91
90	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	313.723.400	306.738.066	6.985.334	98
91	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	427.799.800	403.080.600	24.719.200	94
92	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	293.600	293.600	0	100
93	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	380.000.000	379.828.000	172.000	100
94	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	649.999.600	549.543.490	100.456.110	85
95	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	299.999.750	296.482.600	3.517.150	99
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.532.276.753	5.287.905.890	244.370.863	96
97	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	449.999.500	448.322.078	1.677.422	100
98	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0	0	0	0
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	229.999.700	228.119.700	1.880.000	99
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.350.487.278	2.839.734.503	510.752.775	85
101	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.403.488.660	2.395.571.397	7.917.263	100
102	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	150.000.000	149.504.800	495.200	100
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.356.131.532	4.063.953.588	292.177.944	93
104	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.515.644.084	6.360.568.147	155.075.937	98
105	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.192.717.800	4.214.399.250	-21.681.450	101
106	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.632.700.243	1.080.321.154	552.379.089	66
107	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.248.110.330	3.082.058.965	166.051.365	95
108	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.783.203.800	1.775.821.708	7.382.093	100





BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



109	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.648.952.696	2.548.330.300	100.622.396	96
110	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	160.575.000	157.778.600	2.796.400	98
111	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	260.902.100	247.839.354	13.062.746	95
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.580.968.160	3.305.880.541	275.087.619	92
113	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	140.513.600	138.157.800	2.355.800	98
114	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	28.690.000	27.104.300	1.585.700	94
115	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000	14.920.000	80.000	99
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	158.131.000	157.919.400	211.600	100
117	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	113.492.900	17.380.000	96.112.900	15
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.478.993.952	27.561.955.197	2.917.038.755	90
119	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.373.500.100	7.637.883.351	735.616.749	91
120	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.089.498.800	1.079.437.660	10.061.140	99
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.012.826.036	16.951.673.770	2.061.152.266	89
122	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8.842.027.600	8.629.484.602	212.542.998	98
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.670.588.927	3.536.523.134	134.065.793	96
124	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	923.106.700	823.701.346	99.405.354	89
125	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	447.419.000	430.353.815	17.065.185	96
126	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	485.194.400	465.317.700	19.876.700	96





BerAKHLAK
Berkorban, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.548.573.562	15.224.046.658	3.324.526.904	82
128	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	156.365.768.522	150.485.106.453	5.880.662.069	96
129	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.452.363.844	1.422.913.951	29.449.893	98
130	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.715.792.998	7.878.772.208	837.020.790	90
132	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.291.308.900	3.666.239.847	625.069.053	85
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.140.002.827	3.790.032.741	349.970.086	92
134	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	537.519.400	528.710.042	8.809.358	98
135	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.404.505.000	1.270.464.260	134.040.740	90
136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.037.609.986	6.832.135.717	3.205.474.269	68
137	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	652.028.600	651.848.350	180.250	100
138	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	210.620.000	210.434.000	186.000	100
139	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.304.418.550	6.910.997.959	393.420.591	95
140	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.500.000	7.500.000	0	100
141	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.806.120.000	1.806.117.602	2.398	100
142	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.968.811.888	6.507.390.874	461.421.014	93
143	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.720.000	1.360.000	1.360.000	50
144	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.210.515.000	1.201.950.000	8.565.000	99
145	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	850.000	0	850.000	0





BerAKHLAK
Berkualitas, Berkeadilan, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



146	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.550.000	850.000	1.700.000	33
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.466.036.656	5.183.000.873	283.035.783	95
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	0	0
149	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.200.000.000	1.198.262.000	1.738.000	100
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.807.526	2.772.100.250	215.707.276	93
151	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.500.400	8.846.800	653.600	93
152	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210.978.600	208.947.200	2.031.400	99
153	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.430.200	3.078.756	351.444	90
154	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.643.400	1.633.400	10.000	99
155	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.236.800	2.156.800	80.000	96
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.593.814	2.049.809.415	233.784.399	90
157	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.000	0	329.000	0
158	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	217.600.000	207.650.000	9.950.000	95
159	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.339.967.780	1.278.358.917	61.608.863	95
161	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.179.200	16.179.200	0	100
162	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	0	0	0
163	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	0	0
164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.700.310.260	1.618.163.155	82.147.105	95





LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



165	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.085.400	1.085.400	0	100
166	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.625.500	9.542.400	83.100	99
167	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.496.200	1.496.200	0	100
168	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.878.200	1.878.200	0	100
169	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.854.837.580	2.683.760.531	171.077.049	94
170	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	998.000	998.000	0	100
171	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	211.527.800	191.926.700	19.601.100	91
172	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	902.800	902.800	0	100
173	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.708.400	2.148.200	560.200	79
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.409.391.860	1.257.777.273	151.614.587	89
175	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.900.000	4.801.000	99.000	98
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.761.236.400	1.660.785.391	100.451.009	94
177	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.600.400	3.600.398	2	100
178	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.386.200	3.385.796	404	100
179	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.814.200	2.005.000	-190.800	111
180	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.990.800	3.140.300	-149.500	105
181	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.777.137.659	2.396.656.859	380.480.800	86
182	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	638.410.200	558.694.806	79.715.394	88



     					
LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR					
183	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.618.897.800	13.424.957.600	193.940.200	99
184	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.283.400	2.303.400	1.980.000	54
185	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.977.800	2.020.600	1.957.200	51
186	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	606.690.600	588.058.138	18.632.462	97

D. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Analisis program yang menunjang Pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:



TABEL III.29
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 (PAGU INDIKATIF)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	83.034.956.641	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	10%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	10%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi)	47%	1.315.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				yang dikembangkan sebagai budaya			
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	1,3	10.375.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	100%	234.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	131.977.200.663	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase warga Negara usia lanjut	100%		Dinas Kesehatan



BerAKHLAK
Berkarakter Berprestasi Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
				Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%		Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	100%		Dinas Kesehatan



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	9	68.552.030.000	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH			Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH			
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	100%		Dinas Kesehatan
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,133		RSUD HPDN
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	9%	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Tribina	67%	1.454.241.000	Dinas PPKBPPPA
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	26,17	2.254.784.000	Dinas PUPRPPK



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				WS kewenangan kabupaten/kota			Dinas PUPRPKP
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	77		
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	100%	6.279.375.000	Dinas PUPRPKP
				Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari	100%		Dinas PUPRPKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	4.307.866.000	Dinas PUPRPKP
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	5%	1.900.000.000	Dinas PUPRPKP



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Pengembangan Permukiman	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik		600.000.000	Dinas PUPRPKP
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)		600.000.000	Dinas PUPRPKP
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	11.597,98	900.000.000	Dinas PUPRPKP
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	70%		Dinas PUPRPKP
			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	70%	20.555.967.000	Dinas PUPRPKP
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	50	270.000.000	Dinas PUPRPKP
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	40%	1.025.000.000	Dinas PUPRPKP
				Persentase wilayah yang telah tersusun	40%		Dinas PUPRPKP



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				rencana tata ruang			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	100%	950.000.000	Dinas Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	100%		Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	100%	400.000.000	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan izin	60%	1.150.000.000	Dinas PUPRKP
			Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	100%	150.000.000	Dinas PUPRKP
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di	100%	500.000.000	Dinas PUPRKP



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Kabupaten/ Kota yang Ditangani			Dinas PUPRPKP
				Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,13%		
			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,94%	1.200.000.000	Dinas PUPRPKP
3	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	22.011 ton	7.106.027.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	590.403 Ton	1.150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase poklhas yang meningkat kelasnya	25%	450.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	3,75%	7.395.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Cakupan bina kelompok petani	50	1.300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase peningkatan produksi peternakan	3,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	93		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura	80		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	90		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	90	3.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan	-6,5		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	90	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	44,79	200.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	N/A	300.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	0,57	200.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	50		Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri	N/A		Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha	100	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait			Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100		
				Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	100		Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)	25	25.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	24	45.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	100		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	19,72	50.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	19,97	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	19,10	369.695.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	50	20.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	2	904.435.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	100	4.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Mancanegara Per kebangsaan			Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
				Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	100		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	80	85.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	92,47	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	50	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	0,5	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	54,5	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan



BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	n/a	50.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	3	380.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	77	50.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	38	270.000.000	Dinas PUPRKP
4	Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi	Berkurangnya penduduk miskin	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	9	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	84,2	753.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan	0	600.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	100	25.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	73	25.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	23,5	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi	20	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	20	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	44,79	200.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	N/A	300.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80	70.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	80	125.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	98	105.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	89		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	80		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	100	30.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	87	11.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	87	160.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	100	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				yang dilaksanakan sesuai rencana			Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	100	25.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Pelestarian Lingkungan Hidup	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	80	200.000.000	Dinas LH dan Pertanahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	58,95	1.481.240.000	Dinas LH dan Pertanahan
				Indeks kualitas udara	83,79		Dinas LH dan Pertanahan
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	31,18		Dinas LH dan Pertanahan
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	30		Dinas LH dan Pertanahan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin	30	50.000.000	Dinas LH dan Pertanahan



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	75	2.000.000.000	Dinas LH dan Pertanahan
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota		1.500.000.000	Dinas PUPRPKP
6	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah	93	564.312.644.953	Semua Perangkat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	5.450.000.000	Bagian Ortala Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	62		Bagian Ortala Sekretariat Daerah
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100		Bagian Ortala Sekretariat Daerah
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	64		Bagian Ortala Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0		Bagian Ortala Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	100	750.000.000	Bappelitbangda
				Capaian kinerja Perangkat Daerah	87		Bappelitbangda
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	600.000.000	Bappelitbangda
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100		Bappelitbangda
				Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada	100		Bappelitbangda

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan			
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	1.000.000.000	Inspektorat Daerah
			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	100	450.000.000	Inspektorat Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	100	178.707.855.741	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	92		Badan Pengelola Keuangan Daerah
				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	92		Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	90	2.787.782.359	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100	7.544.708.300	Badan Pengelola Keuangan Daerah



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Jumlah penambahan wajib pajak baru	100		Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	95	320.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	450.000.000	Kecamatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokolanan,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	0	5.450.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	62		Sekretariat Daerah
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	100		Sekretariat Daerah
				Nilai Sakip Sekretariat Daerah	64		Sekretariat Daerah



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	0		Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi	100	6.000.000.000	Sekretariat Daerah
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B		Sekretariat Daerah
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	100		Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100	1.090.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase Penayangan SIRUP	100		Sekretariat Daerah
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	100		Sekretariat Daerah
				Tingkat Inflasi	2,05		Sekretariat Daerah
			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	97	188.704.835	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	98		Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
				Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	50		Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	97	50.000.000	Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100		Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100		Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	98	10.000.000	Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi
				persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	98		Dinas Kependuduk dan Catatan Sipi

No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	100	12.000.000.000	Sekretariat DPRI
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	100		Sekretariat DPRI
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	100	775.000.000	Kecamatan
7	Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	93,26	703.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakar
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	93,26		Satpol PP dan Pemadam Kebakar
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	950.000.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100		BPBD



BerAKHLAK
Berkarakter, Berprestasi, Berkeadilan

**bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100		BPBD
				Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		BPBD
				Persentase penanganan pasca bencana	100		BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	98,25	637.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakar
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	15		Satpol PP dan Pemadam Kebakar
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	89	60.000.000	Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa
				Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial	80		Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa



BerAKHLAK
Berkarakter Berprestasi Berkeadilan

bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 KABUPATEN TAKALAR



No	Prioritas Pembagunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
				Masyarakat (PSM)			
			Program Koordiansi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	100	500.000.000	Kecamatan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	450.000.000	Kecamatan
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	0	100.000.000	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	100	986.990.000	Kesbangpol
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	53	100.000.000	Kesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	24	70.000.000	Kesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	12	180.000.000	Kesbangpol



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target		Perangkat Daerah
					Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	9
			Penanganan Konflik Sosial				
TOTAL						1.168.534.40 3.498,90	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan skala peringkat nilai setiap sasaran strategis, capaian sasaran Tahun 2023 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	118%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur Daerah	114%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Produktifitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	95,56%	Sangat Tinggi
4	Berkurangnya Penduduk Miskin	96,79%	Sangat Tinggi
5	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	111%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	85%	Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	122%	Sangat Tinggi
8	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban	174%	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KAB. TAKALAR		115%	Sangat Tinggi

Pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Kabupaten Takalar pada Tahun 2023, Kabupaten Takalar mencapai rata-rata capaian sebesar 115% dengan Kriteria Sangat Tinggi (ST). Dimana dari 8 (delapan) sasaran Strategis, hanya 1 (satu) sasaran yang mencapai kriteria Tinggi (T), dan lainnya mencapai kriteria Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja yang mencapai hasil yang diharapkan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Takalar. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai dapat memacu semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mencapai realisasi yang diharapkan. Terkait dengan indikator kinerja yang belum

tercapai, maka strategi di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja OPD tahun berjalan untuk memantapkan tahapan realisasi kinerja;
2. Melaksanakan pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala baik itu triwulan, semesteran dan tahunan;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja OPD secara berkala dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan dan mengefesiensikan penggunaan anggaran dengan membuat program-program yang prioritas dan menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.
5. Melakukan revisi RPD dan renstra OPD agar setiap program dari visi misi yang akan dicapai dapat terukur dan selaras satu sama lain.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Takalar ini dibuat sebagai penggambaran capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Takalar. Semoga Laporan ini dapat menjadi umpan balik bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang sehingga pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.